

## Pengaruh Collaborative Governance terhadap Efektivitas Pengelolaan Geopark Bogor Halimun Salak

Kevin Ginaldo<sup>1\*</sup>, Rita Rahmawati<sup>2</sup>, R. Akhmad munjin<sup>3</sup>.

<sup>123\*</sup>Universitas Djuanda, kevinginaldo17@gmail.com, rita.rahmawati@unida.ac.id,  
amunjin@unida.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh collaborative governance terhadap efektivitas pengelolaan Geopark Bogor Halimun Salak di Kabupaten Bogor. Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan kolaborasi berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dalam pengelolaan sumber daya publik secara partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat dalam pengelolaan Geopark, dan dilakukan uji instrumen melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Geopark, yang ditunjukkan melalui hasil uji t dan uji F. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) juga memperlihatkan bahwa collaborative governance memberikan kontribusi dalam menjelaskan variasi efektivitas pengelolaan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa sinergi antar pemangku kepentingan, transparansi, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama merupakan faktor penting untuk mencapai tata kelola pengelolaan Geopark yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Collaborative Governance, Pengelolaan Geopark, Administrasi Publik, Kolaborasi Stakeholder

### PENDAHULUAN

Pengelolaan kawasan Geopark Bogor Halimun Salak merupakan isu penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Sebagai destinasi yang memiliki nilai geologi, ekologi, dan budaya yang tinggi, Geopark membutuhkan sistem pengelolaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga bersifat kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Permasalahan dalam tata kelola Geopark kerap muncul akibat perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kapasitas kelembagaan yang belum optimal. Geopark sendiri merupakan suatu

wilayah geografis, baik tunggal maupun gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (geosite) dan bentang alam bernilai tinggi yang berkaitan dengan warisan geologi (geoheritage), keragaman geologi (geodiversity), keanekaragaman hayati (biodiversity), serta keragaman budaya (cultural diversity). Kawasan ini dikelola untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan melalui keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga mampu meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. (Riyady *et al.*, 2019).

Kajian mengenai geopark telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Salah satu penelitian berjudul “Pemetaan Tata Kelola Pengembangan Pariwisata” menggunakan pendekatan metode campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *proportionate stratified random sampling*, sementara pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengembangan pariwisata di Geopark Pongkor tergolong sangat baik. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan pengembangan pariwisata Geopark Pongkor meliputi potensi geologi yang besar, dukungan dari berbagai sektor, ketersediaan tenaga ahli yang kompeten, kejelasan status wilayah, kerja sama antarpengelola, serta nilai historis kawasan. Adapun kelemahan yang diidentifikasi berkaitan dengan kurang optimalnya koordinasi pengelolaan, regulasi yang belum maksimal, keterbatasan akses jalan dan infrastruktur penunjang, serta sistem retribusi pariwisata. Di sisi lain, peluang yang dapat dimanfaatkan berasal dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sedangkan ancaman yang dihadapi adalah potensi kerawanan bencana di kawasan Pongkor. (Ridwanullah, *et al.*, 2021) Penelitian berjudul “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Geopark Silokek di Kabupaten Sijunjung” menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*

*sampling*. Kajian ini mengacu pada teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Chris Ansell dan Alison Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata Geopark Silokek di Kabupaten Sijunjung tergolong cukup baik. Proses kolaboratif berjalan efektif dan menghasilkan capaian awal berupa terbentuknya kelompok sadar wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terjaganya keindahan kawasan Geopark Silokek, serta diraihnya berbagai penghargaan tingkat nasional. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan, antara lain belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan, serta perlunya pembinaan lebih lanjut terhadap kelompok sadar wisata agar dapat berkembang secara mandiri. (Saputra *et al.*, 2023) Penelitian berjudul “Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan dalam Mendukung Pelestarian Warisan Geologi: Perspektif Collaborative Governance” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan warisan geologi sebagai bagian dari pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pemberdayaan serta pengembangan masyarakat di tingkat lokal dan regional. Selain itu, pengembangan geowisata juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). (Berliandaldo & Holman Fasa, 2022)

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, kajian mengenai kolaborasi *governance* pada geopark, khususnya di Indonesia, masih relatif terbatas, terutama yang mengaitkannya dengan tingkat efektivitas pengelolaan geopark. *Collaborative governance* dipandang sebagai salah satu pendekatan yang mampu menjawab tantangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi, karena menekankan kerja sama lintas sektor melalui komunikasi yang intensif, pertukaran informasi, pembagian peran, serta pengambilan keputusan secara kolektif. Hasil penelitian terdahulu juga mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan

destinasi berbasis konservasi sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi antarpemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan kalangan akademisi sebagai aktor pendukung. Meskipun demikian, penerapan *collaborative governance* dalam konteks Geopark masih jarang dikaji secara empiris. Kondisi ini menimbulkan adanya celah penelitian, khususnya terkait sejauh mana peran *collaborative governance* dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Geopark. Di Indonesia terdapat total 20 geopark yang terdiri atas 8 Geopark Nasional dan 12 Geopark Global UNESCO. Salah satu Geopark Nasional yang masih memerlukan perbaikan dalam aspek pengelolaannya adalah Geopark Bogor Halimun Salak. Kawasan Geopark Bogor Halimun Salak berada di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 556/177/Kpts/Per-UU/2018 pada tanggal 26 Maret 2018. Selanjutnya, melalui Keputusan Bupati Nomor 000.9/207/Kpts/Per-UU/2024 yang ditetapkan pada 27 Februari 2024, disepakati adanya perubahan nama dari Geopark Nasional Pongkor menjadi Geopark Nasional Bogor Halimun Salak.

Pada Geopark Bogor Halimun Salak masih terdapat sejumlah masalah yang berkenaan dengan tata kelola, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan.
2. Keterbatasan sumber daya.
3. Kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan Geopark.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *collaborative governance* terhadap efektivitas pengelolaan Geopark Bogor Halimun Salak di Kabupaten Bogor melalui pendekatan kuantitatif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Responden dalam penelitian merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam

pengelolaan Geopark Bogor Halimun Salak, yang mencakup unsur pemerintah daerah, pengelola Geopark, pelaku usaha pariwisata, serta masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup yang disusun menggunakan skala Likert. Instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Analisis data dilakukan dengan regresi linier sederhana untuk mengkaji pengaruh variabel *collaborative governance* terhadap efektivitas pengelolaan Geopark. Pengujian statistik meliputi uji t untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial, uji F untuk menilai kelayakan model, serta koefisien determinasi ( $R^2$ ) guna mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### A. Tata kelola kolaboratif

##### 1. Dimensi Struktur Jaringan

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Tingkat Variasi Aktor Dalam Jaringan.	4,72	Sangat Baik	4,53	Sangat Baik
2	Terkait Tingkat				

	Dominasi Peran Suatu Aktor.	4,36	Sangat Baik	4	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>4,54</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>4,27</b>	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan hasil tabel yang ditampilkan, secara keseluruhan pegawai dari empat dinas memberikan penilaian yang relatif lebih tinggi dibandingkan masyarakat (POKDARWIS), baik pada aspek keberagaman aktor dalam jaringan maupun tingkat dominasi peran aktor tertentu. Pada indikator pertama, penilaian menunjukkan bahwa variasi aktor berada pada kategori sangat baik, baik menurut pegawai empat dinas dengan nilai 4,72 maupun masyarakat (POKDARWIS) dengan nilai 4,53. Sementara itu, pada indikator kedua yang berkaitan dengan dominasi peran aktor dalam jaringan, pegawai empat dinas memberikan skor sedikit lebih tinggi sebesar 4,36 dibandingkan masyarakat yang memberikan nilai 4,00, meskipun keduanya masih termasuk dalam kategori baik hingga sangat baik. Secara keseluruhan, kedua kelompok responden memberikan penilaian positif terhadap dimensi struktur jaringan, meskipun masyarakat cenderung menilai dominasi peran aktor sedikit lebih rendah. Penilaian ini mencerminkan persepsi yang baik terhadap keberagaman aktor serta peran yang dijalankan dalam jaringan yang ada.

## 2. Dimensi Komitmen Terhadap Tujuan

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian

1	Terkait Tingkat Keseriusan Para Aktor.	4,16	Baik	3,53	Baik
2	Terkait Tingkat Konsistensi Terhadap Kesepakatan.	4,2	Baik	3,46	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>4,18</b>	<b>Baik</b>	<b>3,5</b>	<b>Baik</b>

Pada aspek tingkat keseriusan para aktor, pegawai dari empat dinas memberikan penilaian dengan nilai rata-rata sebesar 4,16 yang termasuk dalam kategori baik. Sementara itu, masyarakat (POKDARWIS) memberikan skor rata-rata 3,53 dan juga berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok responden menilai keseriusan para aktor dalam mencapai tujuan telah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat perbedaan nilai, di mana pegawai empat dinas memberikan penilaian sedikit lebih tinggi, kedua kelompok sepakat bahwa tingkat keseriusan aktor dalam jaringan tergolong baik.

Pada indikator tingkat konsistensi terhadap kesepakatan, pegawai empat dinas memberikan nilai rata-rata 4,20 yang termasuk kategori baik. Di sisi lain, masyarakat (POKDARWIS) memberikan penilaian dengan rata-rata 3,46 yang juga berada dalam kategori baik. Penilaian ini memperlihatkan kesamaan persepsi antara kedua kelompok responden terkait konsistensi para aktor dalam menjalankan kesepakatan. Walaupun pegawai empat dinas cenderung memberikan skor lebih tinggi, keduanya menilai bahwa konsistensi terhadap kesepakatan dalam jaringan masih tergolong baik.

Secara keseluruhan, pegawai empat dinas memperoleh nilai rata-rata total sebesar 4,18 dengan kategori baik, sedangkan masyarakat (POKDARWIS) memperoleh nilai rata-rata total 3,50 yang juga berada dalam kategori baik. Dengan demikian, kedua kelompok responden memberikan penilaian positif terhadap dimensi komitmen terhadap tujuan. Meskipun pegawai empat dinas menilai sedikit lebih tinggi dibandingkan masyarakat, keduanya tetap berada pada kategori penilaian yang sama.

### 3. Dimensi Kepercayaan Diantara Para Aktor

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Tingkat Kepercayaan Antar Aktor.	4,2	Baik	3,53	Baik
2	Terkait Tingkat Konsistensi Perilaku dan Komitmen.	4	Baik	3,6	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>4,10</b>	<b>Baik</b>	<b>3,57</b>	<b>Baik</b>

Pada dimensi tingkat kepercayaan antaraktor, pegawai dari empat dinas memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,20 yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antarpihak di lingkungan dinas tergolong tinggi. Sementara itu, masyarakat (POKDARWIS) memperoleh nilai rata-rata 3,53

yang juga berada dalam kategori baik. Meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan pegawai dinas, tingkat kepercayaan di kalangan masyarakat POKDARWIS tetap menunjukkan kondisi yang cukup positif.

Pada aspek konsistensi perilaku dan komitmen, pegawai empat dinas memperoleh skor rata-rata 4,00 yang masuk dalam kategori baik. Penilaian ini mengindikasikan bahwa pegawai dinas dinilai cukup konsisten dalam menjalankan perilaku serta komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Adapun masyarakat (POKDARWIS) memperoleh nilai rata-rata 3,60 yang masih berada dalam kategori baik, meskipun relatif lebih rendah dibandingkan pegawai dinas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat POKDARWIS dinilai cukup konsisten, namun masih terdapat peluang untuk peningkatan dalam aspek perilaku dan komitmen.

Secara umum, baik pegawai empat dinas maupun masyarakat POKDARWIS menunjukkan tingkat kepercayaan dan konsistensi yang tergolong baik, dengan pegawai dinas memperoleh penilaian sedikit lebih tinggi. Nilai rata-rata keseluruhan untuk pegawai empat dinas adalah 4,10 (kategori baik), sedangkan masyarakat POKDARWIS mencapai 3,57 (kategori baik). Meskipun terdapat perbedaan skor yang relatif kecil, kedua kelompok tetap menunjukkan tingkat kepercayaan dan konsistensi yang positif. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas hubungan antaraktor, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat konsistensi perilaku dan komitmen di kalangan masyarakat POKDARWIS.

#### 4. Dimensi Kejelasan Dalam Tata Kelola

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian

1	Terkait Tingkat Kejelasan Struktur Organisasi.	4,16	Baik	3,46	Baik
2	Terkait Mekanisme Pengambilan Keputusan.	4,12	Baik	3,6	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>4,14</b>	<b>Baik</b>	<b>3,53</b>	<b>Baik</b>

Pegawai dari empat dinas memberikan penilaian sedikit lebih tinggi dengan rata-rata 4,14 (kategori Baik), menunjukkan bahwa mereka menilai struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan sudah jelas serta terorganisir dengan baik. Sementara itu, masyarakat POKDARWIS memberikan penilaian sedikit lebih rendah, yaitu rata-rata 3,53 (kategori Baik), yang menunjukkan bahwa meskipun tata kelola dinilai cukup baik, masih terdapat beberapa aspek, terutama terkait kejelasan struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan, yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Bagi pegawai empat dinas, penting untuk mempertahankan kejelasan struktur yang sudah baik ini sekaligus terus meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan guna menjaga kualitas tata kelola. Sementara itu, bagi masyarakat POKDARWIS, disarankan adanya peningkatan komunikasi dan sosialisasi mengenai struktur organisasi serta mekanisme pengambilan keputusan agar masyarakat lebih memahami prosesnya dan merasa lebih terlibat.

### 5. Dimensi Akses terhadap Kekuasaan

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Tingkat Distribusi Kewenangan.	3,88	Baik	3,4	Cukup Baik
2	Terkait Tingkat Keterlibatan Pengambilan Keputusan.	4,08	Baik	3	Cukup Baik
<b>Jumlah</b>		<b>3,98</b>	<b>Baik</b>	<b>3,2</b>	<b>Cukup</b> <b>Baik</b>

Tingkat distribusi kewenangan bagi pegawai empat dinas memiliki rata-rata 3,88 (kategori Baik), menunjukkan bahwa mereka menilai pembagian kewenangan di instansi cukup jelas dan terstruktur dengan baik. Hal ini menandakan bahwa kewenangan dalam organisasi terbagi secara efektif dan adil. Untuk tingkat keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pegawai memberikan rata-rata 4,08 (kategori Baik), yang menunjukkan sebagian besar merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki akses yang memadai terhadap kewenangan di instansi mereka. Secara keseluruhan, dengan rata-rata 3,98 (kategori Baik), pegawai empat dinas menilai akses terhadap wewenang dan kekuasaan berada pada kategori baik, baik dari sisi distribusi kewenangan maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, masyarakat POKDARWIS memberikan penilaian yang lebih rendah. Rata-rata tingkat distribusi kewenangan mereka adalah 3,4 (kategori Cukup Baik), menandakan bahwa mereka merasa akses terhadap kewenangan masih kurang jelas atau terbatas. Untuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan, rata-ratanya 3,0 (kategori Cukup Baik), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal, meskipun akses tersedia namun belum sepenuhnya dirasakan. Secara keseluruhan, rata-rata penilaian masyarakat terhadap akses mereka terhadap wewenang dan kekuasaan adalah 3,2 (kategori Cukup Baik), lebih rendah dibandingkan pegawai, yang menunjukkan keterbatasan dalam distribusi kewenangan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pegawai empat dinas menilai akses terhadap kewenangannya lebih tinggi, dengan rata-rata 3,98 (kategori Baik), merasa bahwa distribusi kewenangan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan sudah berjalan dengan baik. Sebaliknya, masyarakat POKDARWIS menilai lebih rendah, dengan rata-rata 3,2 (kategori Cukup Baik), menunjukkan bahwa akses mereka terhadap wewenang dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan.

Bagi pegawai, hasil ini menandakan bahwa mereka sudah memiliki akses yang baik terhadap wewenang dan kekuasaan, namun perlu terus menjaga kualitas tersebut melalui komunikasi yang lebih baik, transparansi, serta distribusi kewenangan yang adil. Bagi masyarakat POKDARWIS, disarankan agar keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan ditingkatkan, kewenangan didistribusikan lebih jelas dan terbuka, serta pemahaman masyarakat terhadap struktur kewenangan diperkuat agar partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan lebih maksimal.

### 6. Dimensi Pembagian Akuntabilitas

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Tingkat Kejelasan Peran Tanggung Jawab.	3,84	Baik	3,4	Cukup Baik
2	Terkait Sistem Sanksi dan Penghargaan.	3,64	Baik	2,46	Tidak Baik
<b>Jumlah</b>		<b>3,74</b>	<b>Baik</b>	<b>2,93</b>	<b>Cukup Baik</b>

Berdasarkan rekapitulasi indikator pada dimensi akses terhadap wewenang/kekuasaan, terlihat bahwa pegawai di empat dinas memberikan rata-rata penilaian sebesar 3,74, masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai menilai kewenangan telah terdistribusi secara cukup merata (mean 3,84; kategori baik) dan mereka merasa cukup dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (mean 3,64; kategori baik). Dengan demikian, pegawai menilai bahwa sistem distribusi kewenangan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan sudah berjalan secara efektif.

Di sisi lain, masyarakat POKDARWIS memberikan penilaian lebih rendah, dengan rata-rata 2,93 yang termasuk kategori cukup baik. Secara rinci, masyarakat menilai distribusi kewenangan masih tergolong cukup baik (mean 3,4), namun keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan relatif rendah (mean 2,46; kategori tidak baik). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara pegawai dan masyarakat terkait akses terhadap wewenang/kekuasaan.

Secara keseluruhan, pegawai menilai akses terhadap wewenang/kekuasaan sudah cukup baik, sementara masyarakat masih merasa akses tersebut terbatas, terutama dalam hal partisipasi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan transparansi, komunikasi, dan mekanisme pelibatan masyarakat agar persepsi antara pegawai dan masyarakat lebih selaras terkait dimensi akses terhadap wewenang dan kekuasaan.

### 7. Dimensi Berbagi Informasi

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Tingkat Keterbukaan Berbagi Informasi.	4,16	Baik	3	Cukup Baik
2	Terkait Tingkat Kemampuan Aktor Dalam	4,04	Baik	3,6	Baik

	Memahami Informasi.				
<b>Jumlah</b>		<b>4,10</b>	<b>Baik</b>	<b>3,30</b>	<b>Cukup Baik</b>

Berdasarkan rekapitulasi indikator pada dimensi berbagi informasi, pegawai dari empat dinas memberikan penilaian rata-rata 4,10, yang termasuk kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai menilai keterbukaan dalam berbagi informasi sudah berjalan dengan baik (mean 4,16) dan kemampuan aktor dalam memahami informasi juga dinilai baik (mean 4,04). Dengan kata lain, dari perspektif pegawai, proses berbagi informasi di lingkungan instansi telah mendukung kelancaran komunikasi dan pemahaman kerja.

Sementara itu, masyarakat POKDARWIS memberikan penilaian yang lebih rendah dengan rata-rata 3,30, termasuk kategori cukup baik. Secara lebih rinci, masyarakat menilai keterbukaan dalam berbagi informasi masih cukup baik (mean 3,00), sementara kemampuan aktor dalam memahami informasi sudah tergolong baik (mean 3,60). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menilai pemahaman informasi cukup baik, mereka masih merasakan bahwa tingkat keterbukaan dalam berbagi informasi belum optimal.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan persepsi antara pegawai dan masyarakat terkait dimensi berbagi informasi. Pegawai menilai keterbukaan dan pemahaman informasi sudah baik, sedangkan masyarakat menilainya hanya cukup baik secara umum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem berbagi informasi di internal instansi berjalan dengan baik, masyarakat masih merasakan keterbatasan dalam hal keterbukaan informasi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan mekanisme penyampaian informasi yang lebih inklusif agar persepsi pegawai dan masyarakat lebih selaras dalam dimensi berbagi informasi.

### 8. Dimensi Akses Sumber Daya

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Tingkat Keterbukaan Berbagi Informasi.	3,68	Baik	3,26	Cukup Baik
2	Terkait Tingkat Kemampuan Aktor Dalam Memahami Informasi.	3,92	Baik	3,13	Cukup Baik
<b>Jumlah</b>		<b>3,80</b>	<b>Baik</b>	<b>3,20</b>	<b>Cukup Baik</b>

Berdasarkan rekapitulasi indikator pada dimensi akses terhadap sumber daya, pegawai dari empat dinas memberikan rata-rata penilaian sebesar 3,80, termasuk dalam kategori baik. Secara rinci, pegawai menilai keterbukaan dalam berbagi informasi berada pada kategori baik (mean 3,68) dan kemampuan aktor dalam memahami informasi juga dinilai baik (mean 3,92). Hal ini menunjukkan bahwa menurut pegawai, akses terhadap sumber daya—baik dari sisi keterbukaan maupun kemampuan memahami informasi—sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan program kerja.

Sementara itu, masyarakat POKDARWIS memberikan penilaian rata-rata sebesar 3,20, masuk dalam kategori cukup baik. Keterbukaan berbagi informasi dinilai cukup baik (mean 3,26), dan kemampuan aktor dalam memahami informasi juga tergolong cukup baik (mean 3,13). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih merasakan keterbatasan, baik dalam hal akses informasi maupun kemampuan memahami informasi yang disampaikan, sehingga ada kebutuhan untuk peningkatan agar akses sumber daya lebih optimal.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan persepsi antara pegawai dan masyarakat terkait dimensi akses terhadap sumber daya. Pegawai menilai akses sudah tergolong baik, sementara masyarakat menilai pada kategori cukup baik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun instansi telah berupaya menyediakan keterbukaan informasi dan mendukung pemahaman, masyarakat masih merasakan keterbatasan dan belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, pemerataan akses informasi, serta mekanisme komunikasi yang lebih inklusif agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang setara dengan pegawai.

## B. Efektivitas Pengelolaan Geopark

### 1. Dimensi Pencapaian Tujuan

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Kesesuaian Tujuan Implementasi.	4,16	Baik	4,4	Sangat Baik

2	Terkait Pencapaian Indikator Kinerja.	3,8	Baik	4	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>3,98</b>	<b>Baik</b>	<b>4,20</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Pencapaian Tujuan, pegawai dari empat dinas memberikan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,98, termasuk dalam kategori Baik. Untuk indikator Kesesuaian Tujuan Implementasi, pegawai memberikan penilaian cukup tinggi dengan mean 4,16 (Baik), sedangkan untuk indikator Pencapaian Indikator Kinerja diperoleh mean 3,8 (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai menilai tujuan pelaksanaan program sudah sesuai, meskipun pencapaian kinerja masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal.

Di sisi lain, masyarakat POKDARWIS memberikan penilaian yang sedikit lebih tinggi dengan rata-rata 4,20 (Baik). Pada indikator Kesesuaian Tujuan Implementasi, mereka menilai dengan mean 4,4 (Sangat Baik), sementara pada indikator Pencapaian Indikator Kinerja diperoleh mean 4,0 (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi lebih positif, khususnya terkait kesesuaian tujuan implementasi, meskipun dalam hal pencapaian kinerja, keduanya sama-sama menilai Baik.

Secara keseluruhan, dimensi Pencapaian Tujuan dinilai Baik oleh pegawai maupun masyarakat, dengan mean 3,98 dari pegawai dan 4,20 dari masyarakat. Pegawai lebih menekankan perlunya peningkatan pencapaian kinerja, sedangkan masyarakat menilai bahwa kesesuaian tujuan implementasi sudah sangat baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi program dinilai cukup sesuai dan pencapaian kerjanya sudah baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama dari perspektif pegawai untuk meningkatkan hasil kinerja secara lebih nyata.

## 2. Dimensi Integrasi

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Tingkat Kolaborasi Antar Aktor.	3,92	Baik	3,4	Baik
2	Terkait Keselarasan Kebijakan dan Program.	3,92	Baik	3,73	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>3,92</b>	<b>Baik</b>	<b>3,57</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan rekapitulasi indikator pada dimensi Integrasi, pegawai dari empat dinas memberikan nilai rata-rata (mean) 3,92, yang termasuk kategori Baik. Pada indikator Tingkat Kolaborasi Antar Aktor, pegawai menilai 3,92 (Baik), begitu pula pada indikator Keselarasan Kebijakan dan Program yang juga memperoleh mean 3,92 (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa menurut pegawai, kolaborasi antar aktor serta keselarasan kebijakan dan program sudah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai kategori sangat baik.

Di sisi lain, masyarakat POKDARWIS memberikan rata-rata penilaian 3,57 (kategori Baik). Untuk indikator Tingkat Kolaborasi Antar Aktor, diperoleh mean 3,4 (Baik), sedangkan indikator Keselarasan Kebijakan dan Program mendapat mean 3,73 (Baik). Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai integrasi program sudah baik, meskipun kolaborasi antar aktor dinilai belum seoptimal penilaian pegawai.

Secara keseluruhan, dimensi Integrasi dinilai Baik oleh kedua kelompok, dengan mean 3,92 dari pegawai dan 3,57 dari masyarakat. Pegawai cenderung memberikan penilaian lebih tinggi dibanding masyarakat, baik pada aspek kolaborasi maupun keselarasan kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi dalam pelaksanaan program sudah berjalan baik, namun perlu peningkatan, terutama dalam memperkuat kolaborasi antar aktor agar persepsi masyarakat meningkat dan tercipta sinergi yang lebih optimal antara pegawai dan masyarakat.

### 3. Dimensi Adaptasi

No	Item Pertanyaan	Pegawai 4 Dinas		Masyarakat (POKDARWIS)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Kemampuan Respon Terhadap Perubahan.	3,88	Baik	3,53	Baik
2	Terkait Tingkat Inovasi Strategi dan Program.	3,8	Baik	3,3	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>3,84</b>	<b>Baik</b>	<b>3,42</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan rekapitulasi indikator pada dimensi Adaptasi, pegawai dari empat dinas memberikan penilaian rata-rata (mean) 3,84, termasuk dalam kategori Baik. Pada indikator Kemampuan Respon Terhadap Perubahan, pegawai menilai 3,88

(Baik), sedangkan pada indikator Tingkat Inovasi Strategi dan Program memperoleh nilai 3,8 (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa menurut pegawai, organisasi sudah cukup baik dalam merespons perubahan serta mengembangkan inovasi strategi dan program.

Sementara itu, masyarakat POKDARWIS memberikan rata-rata penilaian 3,42 (kategori Baik). Untuk indikator Kemampuan Respon Terhadap Perubahan, masyarakat menilai 3,53 (Baik), dan pada indikator Tingkat Inovasi Strategi dan Program memperoleh 3,3 (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kemampuan adaptasi organisasi sudah baik, meskipun relatif lebih rendah dibandingkan pegawai, terutama dalam hal inovasi strategi dan program.

Secara keseluruhan, dimensi Adaptasi dinilai Baik oleh kedua kelompok, dengan mean 3,84 dari pegawai dan 3,42 dari masyarakat. Pegawai cenderung menilai lebih tinggi dibanding masyarakat, menunjukkan persepsi bahwa aparatur pemerintah merasa cukup adaptif dalam menghadapi perubahan dan berinovasi, sementara masyarakat masih melihat adanya ruang untuk peningkatan, khususnya pada inovasi strategi dan program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adaptasi organisasi sudah berada pada kategori baik, tetapi perlu ditingkatkan melalui dorongan inovasi yang lebih nyata dan responsif agar lebih selaras dengan harapan masyarakat.

### **C. Pengaruh tata kelola kolaboratif terhadap efektivitas pengelolaan**

#### **Uji validitas**

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen benar-benar mampu mengukur hal yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, data dianggap valid jika informasi yang diperoleh di lapangan sesuai dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Sebaliknya, jika data yang disajikan tidak mencerminkan kondisi nyata dari objek penelitian, maka data tersebut dianggap tidak valid. (Sugiyono, 2020).

Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor dilakukan dengan mengkorelasikan skor suatu faktor — yang terdiri dari beberapa item — dengan skor total seluruh faktor untuk menilai konsistensi antar faktor. Sedangkan validitas item diperoleh dengan mengkorelasikan skor masing-masing item terhadap skor total dari semua item dalam instrumen. Untuk menilai kelayakan sebuah item, dilakukan uji signifikansi terhadap nilai korelasinya. Sebuah item dianggap valid jika korelasinya dengan skor total signifikan. Secara umum, item dikatakan memenuhi kriteria validitas jika koefisien korelasinya ( $r$ ) minimal 0,312. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan pada setiap variabel menggunakan perangkat lunak SPSS untuk memastikan bahwa instrumen yang dipakai benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti secara akurat.

Item	Variabel	R Standar	Corrected Item-Total Correlation	Ket.
X1	Collaborative Governance (X)	>0,312	0,593	Valid
X2		>0,312	0,712	Valid
X3		>0,312	0,735	Valid
X4		>0,312	0,748	Valid
X5		>0,312	0,760	Valid
X6		>0,312	0,726	Valid
X7		>0,312	0,730	Valid
X8		>0,312	0,764	Valid
X9		>0,312	0,705	Valid
X10		>0,312	0,894	Valid
X11		>0,312	0,798	Valid
X12		>0,312	0,715	Valid
X13		>0,312	0,819	Valid
X14		>0,312	0,746	Valid
X15		>0,312	0,684	Valid

X16		>0,312	0,825	Valid
Y1	Efektivitas Pengelolaan Geopark (Y)	>0,312	0,752	Valid
Y2		>0,312	0,689	Valid
Y3		>0,312	0,841	Valid
Y4		>0,312	0,804	Valid
Y5		>0,312	0,733	Valid
Y6		>0,312	0,688	Valid

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, seluruh item pernyataan yang berkaitan dengan variabel Collaborative Governance dan Efektivitas Pengelolaan Geopark menunjukkan nilai  $r$  hitung yang lebih besar dari 0,312. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid. Validitas tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien positif pada kolom Corrected Item-Total Correlation, yang seluruhnya melebihi batas minimal 0,312.

### Uji Reliabilitas

Suatu item dikatakan reliabel atau andal jika jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner tetap konsisten atau stabil meskipun pengukuran dilakukan pada waktu yang berbeda. Untuk menilai tingkat keandalan setiap pertanyaan, digunakan perangkat lunak SPSS versi 29.0 untuk menghitung nilai Cronbach's Alpha dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh lebih dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas dari penelitian ini disajikan sebagai berikut.

No.	Variabel	Nilai $r$	Cronbach's Alpha	Ket.
1.	Collaborative Governance	0,60	.946	Reliable
2.	Efektivitas Pengelolaan Geopark	0,60	.845	Reliable

Berdasarkan hasil yang tersaji pada tabel sebelumnya, seluruh variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semua butir pertanyaan, baik yang merepresentasikan variabel independen maupun dependen, telah memenuhi kriteria reliabilitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan memiliki tingkat konsistensi dan keandalan yang memadai dalam mengukur variabel-variabel pada model penelitian ini.

### Uji Analisis Regresi

#### Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan salah satu alat statistik dasar yang digunakan untuk memahami serta memprediksi hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) (Rohman et al., 2025). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui arah hubungan antar variabel, apakah bersifat positif atau negatif, serta mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan (Muttaqinah et al., 2023).

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji seberapa besar Pengaruh Collaborative Governance terhadap Efektivitas Pengelolaan Geopark Bogor Halimun Salak. Proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 29.0, dan hasil perhitungan dari analisis regresi linier sederhana tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.708	2.531		3.836	<.001
	Collaborative Governance	.218	.041	.654	5.334	<.001

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Geopark

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 29.0, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

	dengan				keterangan:
X	=	Collaborative			Governance
Y	=	Efektivitas	Pengelolaan		Geopark
a	=				konstanta

b = koefisien regresi yang menunjukkan arah serta besarnya perubahan variabel dependen akibat perubahan variabel independen.

Hasil perhitungan regresi menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 9,708 + 0,218X$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta (a) sebesar 9,708 menunjukkan bahwa ketika variabel Collaborative Governance (X) bernilai nol, maka Efektivitas Pengelolaan Geopark (Y) berada pada angka 9,708. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan asumsi variabel independen bersifat tetap, Collaborative Governance memberikan pengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Geopark.

Koefisien regresi (b) sebesar 0,218 dan bernilai positif mengandung makna bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Collaborative Governance akan meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Geopark sebesar 0,218, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi konstan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta Efektivitas Pengelolaan Geopark sebesar 9,708 mengindikasikan bahwa peningkatan dalam Collaborative Governance memberikan pengaruh terhadap tingkat Efektivitas Pengelolaan Geopark. Sementara itu, nilai koefisien X sebesar 0,218 menunjukkan adanya hubungan positif antara Collaborative Governance dan Efektivitas Pengelolaan Geopark. Artinya, semakin tinggi Collaborative Governance, maka semakin tinggi pula tingkat Efektivitas Pengelolaan Geopark.

### **Uji Analisis Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi akan memperlihatkan besarnya suatu hubungan antara Variabel Independen yaitu Collaborative Governance (X) dengan Variabel dependen

Efektivitas Pengelolaan Geopark (Y) adalah dengan melihat hasil R yang sudah di peroleh, sedangkan determinasi (R<sup>2</sup>) atau sumbangan Pengaruh Collaborative Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Geopark Boogor Halimun Salak dapat dilihat pada nilai R square, sebagai berikut:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654 <sup>a</sup>	.428	.413	2.231

a. Predictors: (Constant), Collaborative Governance

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Diketahui:

$$\text{Nilai } R^2 \text{ atau R square} = 0,428$$

$$KD = 0,428 \times 100\%$$

$$KD = 42,8\%$$

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,428, yang menandakan adanya hubungan yang kuat antar variabel. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) mencapai 0,428, yang berarti bahwa sebesar 42,8% tingkat Efektivitas Pengelolaan Geopark (Y) dipengaruhi oleh Collaborative Governance (X).

### Uji T

Pengujian hipotesis parsial bertujuan untuk mengukur Pengaruh Collaborative Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Geopark Bogor Halimun Salak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1						
	(Constant)	9.708	2.531		3.836	< .001
	Collaborative Governance	.218	.041	.654	5.334	< .001

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Geopark

koefisien regresi sebesar 0,218 dengan nilai t-hitung sebesar 5,334. Seterusnya untuk menentukan nilai t tabel maka menggunakan rumus:

$$DF = N - K - 1$$

Ket:

DF = Derajat Kebebasan

N = Jumlah Sampel

K = Jumlah Variabel Independen

1 = Dikurangi 1 untuk mengakomodasi intersep (konstanta)

$$DF = (40 - 1 - 1)$$

$$DF = (38) = 1,686$$

Dengan telah didapatkan nilai t hitung dan nilai t tabel diatas yaitu t hitung = 5,334 dan nilai t tabel = 1,686, maka dapat disimpulkan berdasarkan kriteria pengujiannya t hitung > t tabel maka Hipotesis alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis nol (Ho) ditolak dan tingkat signifikansinya adalah  $0,001 < 0,05$ . Yang berarti secara parsial variabel Collaborative Governance berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Geopark.

Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa *collaborative governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Geopark Bogor Halimun Salak. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,654 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kedua variabel. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,428 mengindikasikan bahwa *collaborative governance* berkontribusi sebesar 42,8% terhadap variasi perubahan efektivitas pengelolaan Geopark, dan sisanya sebesar 57,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji ANOVA menunjukkan bahwa model regresi signifikan, ditunjukkan oleh nilai  $F = 28,447$  dengan tingkat signifikansi  $p < 0,001$ , sehingga model layak digunakan untuk memprediksi efektivitas pengelolaan. Selain itu, hasil uji t menunjukkan bahwa *collaborative governance* berpengaruh secara signifikan

terhadap efektivitas pengelolaan Geopark dengan nilai  $t = 5,334$  dan  $p < 0,001$ . Persamaan regresi yang diperoleh adalah:  $Y = 9,708 + 0,218X$  Persamaan ini menggambarkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel collaborative governance akan meningkatkan efektivitas pengelolaan Geopark sebesar 0,218 poin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan collaborative governance, semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan Geopark Bogor Halimun Salak. Temuan ini mendukung model teoretis yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), yang menyatakan bahwa kolaborasi dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui partisipasi, kesepakatan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Secara lebih rinci, variabel-variabel yang menjadi bagian dari collaborative governance, seperti komunikasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, dan distribusi kewenangan, berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Hal ini sejalan dengan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menekankan bahwa *collaborative governance regime* akan efektif apabila terdapat kepercayaan, struktur peran yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang terinstitusionalisasi.

Penelitian ini sejalan dengan studi Bryson, Crosby, dan Stone (2015) yang menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan strategis untuk menangani masalah pengelolaan publik yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dalam konteks Geopark Bogor Halimun Salak, keberhasilan kolaborasi tercermin dari sinergi antara pemerintah, pengelola, akademisi, dan masyarakat lokal dalam mendukung konservasi, pendidikan, dan pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris dalam bidang administrasi publik, tetapi juga menegaskan relevansi collaborative governance sebagai model tata kelola destinasi wisata berbasis konservasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance memiliki pengaruh signifikan dan memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas pengelolaan Geopark Bogor

Halimun Salak. Temuan ini menekankan bahwa keberhasilan tata kelola kawasan wisata berbasis konservasi sangat bergantung pada kualitas koordinasi, komunikasi, dan keterlibatan berbagai aktor dalam proses kebijakan serta pelaksanaannya.

### **Pembahasan**

Penelitian Ridwanullah et al. (2021) mengenai tata kelola pengembangan pariwisata di Geopark Pongkor menunjukkan bahwa pengelolaan geopark sudah termasuk kategori sangat baik, dengan keunggulan utama pada potensi geologi, dukungan lintas sektor, dan kerja sama antar pengelola. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi beberapa kelemahan, seperti koordinasi pengelolaan, regulasi, dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat kesamaan dalam mengidentifikasi tantangan tata kelola, terutama terkait koordinasi dan peran antar pemangku kepentingan. Perbedaan utamanya, penelitian ini lebih menekankan pada delapan dimensi Collaborative Governance (DeSeve, 2007), yang secara lebih terstruktur menilai aspek kolaborasi, termasuk distribusi kewenangan, pembagian akuntabilitas, dan akses terhadap sumber daya.

Saputra et al. (2023), dalam penelitiannya tentang Collaborative Governance di Geopark Silokek, Kabupaten Sijunjung, menemukan bahwa kolaborasi telah berjalan cukup baik, ditandai dengan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan penerimaan penghargaan nasional. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti keterbatasan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini, yang juga menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara pegawai dan masyarakat terkait akses terhadap kewenangan serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini memperkuat temuan Saputra et al. dengan data kuantitatif, di mana dimensi "Akses terhadap Wewenang/Kekuasaan" memperoleh skor rendah dari masyarakat (3,20, kategori cukup baik), menunjukkan perlunya peningkatan inklusivitas dalam proses kebijakan.

Berliandaldo dan Holman Fasa (2022) menekankan bahwa pengelolaan geowisata secara berkelanjutan dapat mendukung pencapaian Sustainable

Development Goals (SDGs) sekaligus memberdayakan masyarakat. Penelitian ini mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat, khususnya POKDARWIS, merupakan faktor penting bagi keberhasilan pengelolaan geopark. Namun, penelitian ini juga memberikan analisis yang lebih rinci secara kuantitatif per dimensi, misalnya skor pada dimensi “Akses Sumber Daya” yang hanya mencapai rata-rata 3,20 menurut masyarakat, menunjukkan perlunya distribusi sumber daya yang lebih merata agar pengelolaan berkelanjutan dapat terwujud.

Pujiyono (2022) menemukan bahwa kolaborasi multi-aktor di Geopark Belitung berjalan sukses meskipun ada dominasi dari pemerintah, terutama Dinas Pariwisata. Temuan ini sejalan dengan penelitian ini, yang juga menunjukkan adanya persepsi dominasi aktor tertentu pada dimensi “Struktur Jaringan,” meskipun skor dari pegawai dan masyarakat tetap tinggi (masing-masing 4,54 dan 4,27). Penelitian ini menambah temuan Pujiyono dengan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap keseimbangan peran antar aktor, yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi.

Sanjaya et al. (2022) menyimpulkan bahwa tata kelola dan pengembangan Geopark Pongkor masih membutuhkan perbaikan yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini, yang menunjukkan kelemahan pada dimensi “Pembagian Akuntabilitas” (rata-rata 2,93 menurut masyarakat), menandakan perlunya peningkatan sistem tanggung jawab yang transparan serta mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih jelas.

Penelitian Aristy et al. (2021) mengenai proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor menemukan adanya kelemahan pada aspek komunikasi, kepercayaan, dan pemahaman bersama antaraktor. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menyajikan data kuantitatif, di mana dimensi “Kepercayaan Antar Aktor” memperoleh skor 4,10 dari pegawai dan 3,57 dari masyarakat.

Meskipun keduanya termasuk kategori baik, hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi yang perlu diperbaiki.

Putri et al. (2019) meneliti kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Geopark Ciletuh dan menemukan keberhasilan dalam pembentukan kelembagaan serta penyusunan rencana kerja. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menampilkan gambaran konkret pelaksanaan kolaborasi di Geopark Bogor Halimun Salak, yang melibatkan berbagai aktor secara luas, namun masih menghadapi kendala terkait distribusi kewenangan dan akses terhadap sumber daya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat dan memperluas kajian tentang Collaborative Governance dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif yang lebih sistematis. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang sebagian besar fokus pada analisis kualitatif, penelitian ini menggabungkan analisis deskriptif kuantitatif untuk menilai persepsi pegawai dan masyarakat secara rinci pada delapan dimensi Collaborative Governance. Penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada aspek kewenangan, akuntabilitas, dan distribusi sumber daya, yang jarang dibahas dalam studi sebelumnya.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa meskipun struktur jaringan dan mekanisme tata kelola dinilai baik, partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menambahkan dimensi baru dalam Collaborative Governance, yakni kesetaraan akses dan persepsi publik, sebagai faktor penting keberhasilan kolaborasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pengelola geopark untuk meningkatkan komunikasi, distribusi kewenangan, serta inovasi dalam pengelolaan Geopark Bogor Halimun Salak secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *collaborative governance* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Geopark Bogor Halimun Salak di

Kabupaten Bogor. Kolaborasi antar aktor merupakan kunci untuk meningkatkan transparansi, koordinasi, dan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan Geopark.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan Geopark dapat dilakukan melalui penguatan struktur kolaborasi, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, serta penguatan regulasi dan sistem monitoring. Temuan ini juga diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, lembaga pengelola Geopark, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi pengelolaan yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Ansell, C. & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571.
- Bryson, J.M., Crosby, B.C. & Stone, M.M. (2015). *Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging*. *Public Administration Review*, 75(5), pp. 647–663.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. California: SAGE Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T. & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), pp. 1–29.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. California: SAGE Publications.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

UNESCO. (2020). UNESCO Global Geoparks Guidelines. Paris: UNESCO.

Wahyudi, A. (2021). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), pp. 112–125